

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia dengan letak geografisnya yang berada di antara dua benua dan dua samudera, di sepanjang garis khatulistiwa, serta terletak pada pertemuan jalur pegunungan dunia, mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 pulau, Indonesia membentangkan dua kawasan biogeografis – Indomelayu dan Australia – dan mendukung berbagai jenis kehidupan flora dan fauna dalam hutan basah yang asli dan kawasan pesisir serta laut yang kaya. Keanekaragaman tumbuhan dan hewan di hutan Indonesia sangat tinggi. Terdapat 400 spesies meranti (70% dari spesies meranti dunia), 122 spesies bambu (dari 1200 spesies bambu dunia), serta 5000 spesies anggrek. Selain itu sekurang-kurangnya terdapat satu juta spesies hewan dari sekitar 13 – 16% spesies hewan dunia di hutan tropis Indonesia (Hayati, 2007: 940 – 941).

Dari lingkungan tersebut, segala kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Maka merupakan hal yang sangat wajar bila interaksi manusia dengan lingkungannya akan berlangsung secara berkelindan dan terus-menerus (Hamzah, 2013: 1). Selain itu dalam tatanan dunia yang semakin mengglobal, terjadi interaksi yang cukup rumit, jalinan interaksi lokal tidak lagi dapat dibedakan dengan jalinan interaksi dalam skala global. Hal ini berdampak pada munculnya gaya hidup kosmopolitan, munculnya pola konsumsi dan konsumerisme global, menurunnya kedaulatan negara suatu bangsa, tumbuhnya sistem militer global (pasukan multi nasional), pengakuan tentang terjadinya krisis lingkungan dunia, berkembangnya masalah-masalah kesehatan berskala dunia (seperti penyakit AIDS), munculnya lembaga-lembaga politik dunia (seperti PBB), munculnya gerakan-gerakan politik global, perluasan konsep hak-hak asasi manusia, dan interaksi rumit antar berbagai agama dunia (Hayati, 2007: 938).

Tekanan yang meningkat dalam memenuhi tuntutan kebutuhan penduduk dan pengelolaan lingkungan yang tidak memadai merupakan tantangan bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Banyak permasalahan lingkungan bermunculan, di antaranya penebangan hutan secara liar; polusi air dari limbah industri dan pertambangan; polusi udara di daerah perkotaan (seperti Jakarta yang merupakan kota dengan udara paling kotor ke 3 di dunia); asap dan kabut dari kebakaran hutan; kebakaran hutan permanen yang tidak dapat dipadamkan; perambahan suaka alam dan suaka margasatwa; perburuan liar, perdagangan dan pembasmian hewan liar yang dilindungi; penghancuran terumbu karang; pembuangan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari negara maju; pembuangan sampah tanpa pemisahan/pengolahan; semburan lumpur liar di Sidoarjo, Jawa Timur; serta hujan asam yang merupakan akibat dari polusi udara.

Jika diamati kota tempat kampus UPI ini berada yaitu Bandung, perkembangan satu dekade terakhir ini menjadikan citra kota Bandung yang dulunya bersih hijau berbunga menjadi kota yang semrawut. Kesejukan udaranya tidak didukung oleh pengaturan kota yang rapi dan teratur. Rutinitas kota selalu diwarnai kemacetan, sampah menumpuk di beberapa tempat, berkurangnya daerah resapan air (sebagai akibat dari dibangunnya villa-villa dan resort di wilayah Bandung Utara), serta polusi udara, karena padatnya kendaraan bermotor.

Tentunya harus disadari bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungannya, dampaknya akan kembali lagi kepada manusia, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian (Hamzah: 2013: 3). Masalah-masalah lingkungan yang timbul harus segera diatasi untuk kelangsungan hidup masyarakat di masa depan. Penanganan masalah lingkungan ini membutuhkan perubahan pola pikir (*mind set*) dari setiap warga. Penanaman kesadaran hidup berwawasan lingkungan penting dilakukan sejak dini.

PBB mengenalkan paradigma baru dalam pembangunan, menggantikan paradigma pembangunan ekonomi yang menimbulkan resiko kerusakan sosial dan lingkungan, yaitu paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep pembangunan berkelanjutan menurut Komisi

Bruntland tahun 1987 adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

*“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”* (UNESCO, 2012: 1)

Keberlanjutan adalah paradigma berpikir tentang masa depan, yaitu ketika lingkungan, sosial dan ekonomi dipertimbangkan secara seimbang dalam mengejar pembangunan dan perbaikan kualitas hidup (UNESCO, 2012: 1). Jika dicermati, sesungguhnya kesadaran akan hidup berwawasan lingkungan merupakan bagian dari konsep *sustainable development* ini, yaitu gaya hidup dengan memperhatikan daya dukung lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang di masa depan.

Dalam proses penanaman cara berpikir sadar lingkungan demi keberlanjutan masa depan, pendidikan merupakan alat yang sangat penting. Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas manusia untuk mengatasi isu-isu lingkungan dan pembangunan, yang terkait erat dengan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu sebuah pendidikan dasar yang tepat harus melakukan reorientasi untuk memasukkan lebih banyak pengetahuan, keterampilan, perspektif, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan keberlanjutan (Hopkins & Mckeown, 1999).

Upaya dari pemerintah untuk melaksanakan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah sesungguhnya telah ada. Seperti yang telah diketahui di dunia pendidikan nasional, Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 sama-sama memberi peluang bagi satuan pendidikan untuk mengangkat nilai-nilai kearifan lokal serta memenuhi kebutuhan daerah akan kompetensi tertentu, dalam kurikulum muatan lokal. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum; Pedoman Pengembangan Muatan Lokal, disebutkan bahwa ruang lingkup muatan lokal mencakup: lingkup keadaan dan kebutuhan daerah; serta lingkup isi/jenis muatan lokal yang dapat berupa bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan

dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi daerah yang bersangkutan. Dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum; Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), disebutkan bahwa Penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan dan kondisi setiap daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur. Begitu pula halnya, apabila muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Tentunya Pemerintah Daerah harus melihat Pendidikan Lingkungan Hidup menjadi hal yang strategis dan urgen untuk dilaksanakan demi keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.

Melalui kebijakan pemerintah daerah, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup, sebagai landasan kebijakan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah di wilayah propinsi Jawa Barat. Meskipun begitu belum semua sekolah di kota Bandung ini, sebagai ibu kota propinsi, memasukkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dalam kurikulum muatan lokalnya. Sekolah yang telah menerapkan PLH pun hasilnya belum maksimal, terlihat dari fisik sekolah maupun aktivitas dan perilaku siswanya yang belum sepenuhnya sadar lingkungan.

Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2006 melaksanakan program Adiwiyata, yaitu program pemberian penghargaan bagi sekolah “hijau” yang bertujuan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Program Adiwiyata atau sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dikembangkan

berdasarkan MOU Nomor 03/MENLH/02/2010 dan 01/II/kb/2010 tanggal 1 Pebruari 2010.

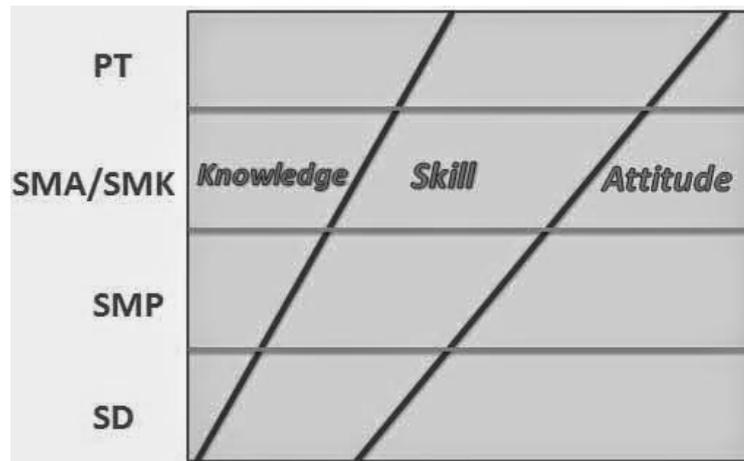
Tujuan Program Adiwiyata adalah untuk terwujudnya perubahan perilaku ramah lingkungan. Program diarahkan kepada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK di seluruh Indonesia dengan target sasaran 10% dari total sekolah di Indonesia atau sama dengan 25.825 sekolah. Namun sampai tahun 2014 sekolah yang ikut berpartisipasi dalam program Adiwiyata baru mencapai 7761 sekolah dari 251.415 sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) Se-Indonesia. Bahkan dari tahun 2013 ke 2014 terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah penerima Adiwiyata Mandiri sejumlah 47 sekolah dari yang tahun sebelumnya 120 sekolah (Kementerian Lingkungan Hidup, 2014).

Kebijakan pemerintah tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan dalam penumbuhan kesadaran lingkungan. Dari hal yang paling sederhana saja masih banyak ditemui pelajar yang membuang sampah sembarangan di tempat-tempat umum. Padahal sejatinya diharapkan siswa menjadi agen perubahan, minimal dalam keluarganya sendiri. Bahkan penghargaan Adiwiyata yang diterima sekolah belum menjamin adanya kesadaran berperilaku sadar lingkungan dari warga sekolahnya, mengingat kecenderungan penghargaan Adiwiyata hanya menjadi ukuran kredibilitas sekolah yang hanya disiapkan saat penilaian saja.

Kondisi yang demikian menuntut dilakukannya Evaluasi Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup khususnya dalam proses implementasinya, yang saat ini dilaksanakan di sekolah-sekolah, agar diketahui apa yang menjadi kendala serta bagaimana strategi implementasi kurikulum PLH yang terbaik dalam usaha mendidik siswa untuk sadar lingkungan. Untuk lebih khususnya akan dilakukan studi evaluatif di jenjang Pendidikan Dasar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penanaman sikap sadar lingkungan lebih mudah diterapkan pada anak usia sekolah dasar. Semakin muda usia anak, semakin mudah untuk dididik dan dibentuk karakternya. Maka jenjang usia paling strategis untuk memulai pendidikan lingkungan hidup adalah usia SD dan pra sekolah. Sesuai

dengan Grafik 1 dari Marzano (1985) dan Bruner (1960) tentang keseimbangan antara penanaman sikap (*attitude*), keterampilan (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*) untuk membangun *Soft Skill* dan *Hard Skill*, mulai dari siswa Sekolah Dasar hingga mahasiswa Perguruan Tinggi.



Gambar 1.1 Grafik Keseimbangan Sikap, Keterampilan, dan Pengetahuan  
Sumber: Marzano (1985) dan Bruner (1960) dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013: 17)

Dari grafik dapat disimpulkan bahwa aktivitas pembelajaran di jenjang Sekolah Dasar harus lebih banyak bertujuan untuk penanaman sikap dibanding dengan pelatihan keterampilan atau menambah pengetahuan. Sikap yang ditanamkan dan dibentuk termasuk juga sikap sadar lingkungan, sikap yang menyadari bahwa apapun yang manusia lakukan akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kelangsungan hidup masa depannya.

2. Dari seluruh sekolah yang berpartisipasi dalam program Sekolah Adiwiyata dari tahun 2009 sampai 2014 di propinsi Jawa Barat, peserta dari jenjang Sekolah Dasar hanya 25,1% (Tabel 1.1). Hal ini patut disayangkan karena justru di jenjang awal usia sekolah seharusnya pendidikan karakter mendapat porsi paling banyak. Karena itu diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang berarti berupa rekomendasi dan saran-saran mengenai implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di jenjang SD.

Tabel 1.1  
Jumlah Peserta Program Adiwiyata di Propinsi Jawa Barat

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Seluruh Sekolah Peserta</b>	<b>Jumlah Peserta Sekolah Dasar</b>
<b>2009</b>	20	4
<b>2010</b>	12	3
<b>2011</b>	43	12
<b>2012</b>	39	7
<b>2013</b>	83	17
<b>2014</b>	78	26
<b>Jumlah</b>	<b>275</b>	<b>69 (25,1 %)</b>

Sumber: BPLHD Propinsi Jawa Barat

Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya, maupun pada pengambilan keputusan dalam bidang kurikulum. Tentunya proses evaluasi harus dilaksanakan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Maka penentuan model evaluasi yang dipilih harus sesuai dengan fokus masalah yang akan dicari jawabannya. Setiap model memiliki keunggulan dan kelemahan, maka Hasan (2008: 238) berpendapat bahwa evaluator harus memahami keunggulan dan kelemahan tersebut dan kemudian menggunakan model yang sesuai dengan keperluannya.

Sesungguhnya sekolah-sekolah yang telah meraih penghargaan Adiwiyata, baik tingkat kota, propinsi, nasional, maupun mandiri, telah melalui proses penilaian yang cukup komprehensif. Dalam Program Sekolah Adiwiyata, penilaian capaian sekolah meliputi 4 indikator, yaitu: Kebijakan Berwawasan Lingkungan; Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan; Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif; dan Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan. Penilaian terhadap keempat indikator tersebut menunjukkan adanya proses penilaian kurikulum pendidikan lingkungan hidup dari dimensi hasil. Namun untuk mendapatkan gambaran

yang jelas mengenai bagaimana hasil yang baik tersebut dapat dicapai, perlu dilakukan evaluasi dan penilaian dalam dimensi proses atau dalam pelaksanaan kurikulumnya. Sehingga didapatkan penjelasan yang lengkap tentang bagaimana cara-cara yang efektif dan efisien dalam melaksanakan kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup agar tujuan kurikulumnya dapat tercapai.

Berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan gambaran jelas dalam proses pelaksanaan kurikulum, maka penelitian ini akan menggunakan model evaluasi studi kasus. Model studi kasus dapat menyediakan penjelasan program yang otoritatif, mendalam, dan terdokumentasi dengan baik (Stufflebeam, 2000: 54).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan sebuah judul penelitian sebagai berikut:

**Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup (Studi Komparatif berdasarkan model Studi Kasus di SD BPI dan SDN Sejahtera Bandung).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana seharusnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup dilaksanakan di jenjang Sekolah Dasar agar dapat mencapai tujuan kurikulum secara efektif dan efisien. Secara rinci penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan kurikulum muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup di SD BPI dan SDN Sejahtera Bandung?
2. Apa persamaan dan perbedaan proses yang terjadi dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup di kedua sekolah tersebut?
3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan pencapaian tujuan kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup serta faktor apa yang menjadi kendala?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan kurikulum muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup di SD BPI dan SDN Sejahtera Bandung.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan proses yang terjadi dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup di kedua sekolah tersebut.
3. Mendeskripsikan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan pencapaian tujuan kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup serta faktor apa yang menjadi kendala.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis;
  - 1) Sebagai sarana pengembangan pengetahuan dalam bidang pengembangan kurikulum yang telah didapatkan selama berkuliah di Program Studi Pengembangan Kurikulum. Dengan melakukan penelitian di bidang evaluasi kurikulum dapat menjadi referensi secara langsung ketika bekerja di lapangan dalam mengelola dan mengembangkan serta mengevaluasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan.
  - 2) Penelitian ini dapat memberi pengalaman yang berharga bagi Peneliti dalam melakukan studi evaluasi pelaksanaan kurikulum, sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian-penelitian lainnya.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah tingkat kota dan kabupaten;

Dapat memberi masukan dalam melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup pada pendidikan dasar

b. BPLHD dan BPLH tingkat kota dan kabupaten;

- 1) Dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dalam pengembangan lebih lanjut Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup dan lebih jauh lagi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Education for Sustainable Development*).
- 2) Dapat memberi masukan dalam melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup di sekolah-sekolah dasar.

c. Bagi Sekolah-sekolah Dasar

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang bagaimana proses pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penanaman kesadaran lingkungan

d. Bagi Kepala Sekolah

Dapat dijadikan gambaran, acuan, dan pedoman bagaimana peran strategis Kepala Sekolah sebagai pemimpin kurikulum dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup.

e. Bagi Guru

- 1) Sebagai bahan refleksi guru dalam melaksanakan pembelajaran muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup di kelas.
- 2) Meningkatkan kualitas guru dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup.
- 3) Membantu dalam pencapaian tujuan kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup
- 4) Membantu mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup.

- 5) Memberi masukan pada guru tentang pola pembelajaran yang dapat mencapai tujuan kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Evaluasi Kurikulum**

Ada berbagai pengertian dari evaluasi kurikulum sesuai dengan perkembangan pemahaman tentang kurikulum itu sendiri. Namun dalam penelitian ini definisi yang digunakan adalah evaluasi kurikulum sebagai sebuah usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu (Hasan, 2009: 41).

### **2. Kurikulum Muatan Lokal**

Muatan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 77 N Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dinyatakan bahwa : (1) Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal; (2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang berisi bahan kajian dan penanaman nilai-nilai kearifan lokal dan potensi daerah serta kebutuhan daerah. Melihat permasalahan lingkungan yang ada, pelestarian lingkungan sudah menjadi kebutuhan di hampir tiap daerah di Indonesia. Maka pendidikan lingkungan hidup menjadi suatu kebutuhan di sekolah-sekolah sebagai sarana menanamkan kesadaran hidup berwawasan lingkungan.

### **3. Pendidikan Lingkungan Hidup**

Pendidikan lingkungan hidup menurut konvensi UNESCO di Tbilisi tahun 1977 adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang terkait di dalamnya serta memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen, dan keterampilan untuk bekerja, baik secara perorangan maupun kolektif dalam mencari alternatif atau memberi solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ada sekarang dan untuk menghindari timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup baru (Hamzah, 2013: 39).

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Pendidikan Lingkungan Hidup adalah proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan serta motivasi, komitmen, dan keterampilan dalam memecahkan masalah lingkungan, minimal di lingkungan sekitarnya.

#### **F. Struktur Organisasi Laporan Penelitian**

Laporan ini terdiri dari lima bab yang secara garis besar mencakup:

Bab I Pendahuluan, isinya meliputi latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional yang digunakan dalam penelitian, dan struktur organisasi laporan.

Bab II berisi kajian teoritis yang akan menguraikan bahasan mengenai konsep Evaluasi Kurikulum termasuk model evaluasi yang digunakan dan konsep Pendidikan Lingkungan Hidup.

Bab III Prosedur Penelitian, mengemukakan mengenai metoda penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian.

Bab IV menguraikan deskripsi hasil penelitian dan pembahasannya.

Bab V berisi kesimpulan dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait.